

KETERSEDIAAN DAGING NASIONAL

WEBINAR MUSYAWARAH NASIONAL ISMAPETI XVI 15 NOV 2020

ROCHADI TAWAF

**SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERHIMPUNAN PETERNAK SAPI DAN KERBAU INDONESIA**



PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan sumber protein hewani asal daging sapi, **HARUS berkesinambungan, berdaya saing, dan memberikan kesejahteraan** bagi peternak sapi potong di Indonesia.

(Yudi Guntara, 2010)

REALISASI DAN PROGNOSA DAGING SAPI/KERBAU TAHUN 2019 DAN 2020

Sumber: Rapat Kemenko Perekonomian (Gin-Gin Ginanjar, 2020)

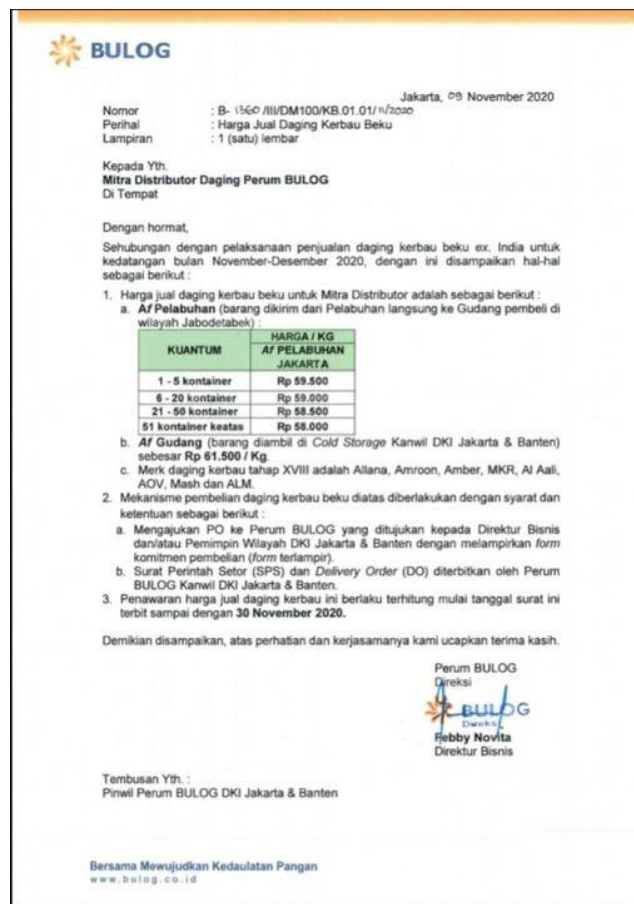
Uraian	2019 Realisasi	2020 Prognosa
Jumlah Penduduk (000 jiwa)	266.911,9	269.603,4
Konsumsi (kg/kapita/tahun)	2,56	2,66
A. Kebutuhan Nasional (ton)	683.294 (3,50 jt ekor)	717.150 (3,63 jt ekor)
B. Produksi Dalam Negeri (ton)	404.590 (2,26 juta ekor)	422.533 (2,32 juta ekor)
Sapi Potong (ton)	376.360 (2,09 jt ekor)	388.583 (2,12 jt ekor)
Sapi Perah (ton)	6.920 (32,67 rb ekor)	6.438 (28,30 rb ekor)
Kerbau (ton)	21.310 (130,98 rb ekor)	27.512 (170,16 rb ekor)
C. Surplus/Defisit (ton) (B-A)	-278.704 (1,24 jt ekor)	-294.617 (1,31 jt ekor)
D. Impor	314.596	312.055
Daging Kerbau (ton)	79.574	100.000*
Daging Sapi (ton)	124.485	100.000
Daging Sapi Brasil (BUMN) (ton)	3.528	-
Sapi Bakalan (ekor)	477.485 (107.009 ton)	500.000 (112.055 ton)
E. Neraca (ton) (C+D)	35.892	17.438

Supply – Demand Daging sapi/kerbau Tahun 2020

- **Ketersediaan = 422.533 ton dikurangi kebutuhan nasional = 717.150 ton, defisit sebesar (294.617 ton).**
- **Defisit daging akan dipenuhi impor daging kerbau sebesar 100.000 ton, daging sapi sebesar 100.000 ton, dan sapi bakalan sebesar 500.000 ekor.**
- **Pemerintah berencana menambah izin impor daging India sebesar (175.000-200.000) ton atau setara 900.000 ekor sapi (diatas yang direncanakan 100.000 ton), bila terealisasi maka terjadi oversupply daging sapi.**
- **Rasio Impor : 65% Domestik 35%**



Proteksi Peternakan Rakyat terhadap impor



UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja :

Pasal 29. Ayat 5.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya **wajib untuk melindungi usaha** peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.

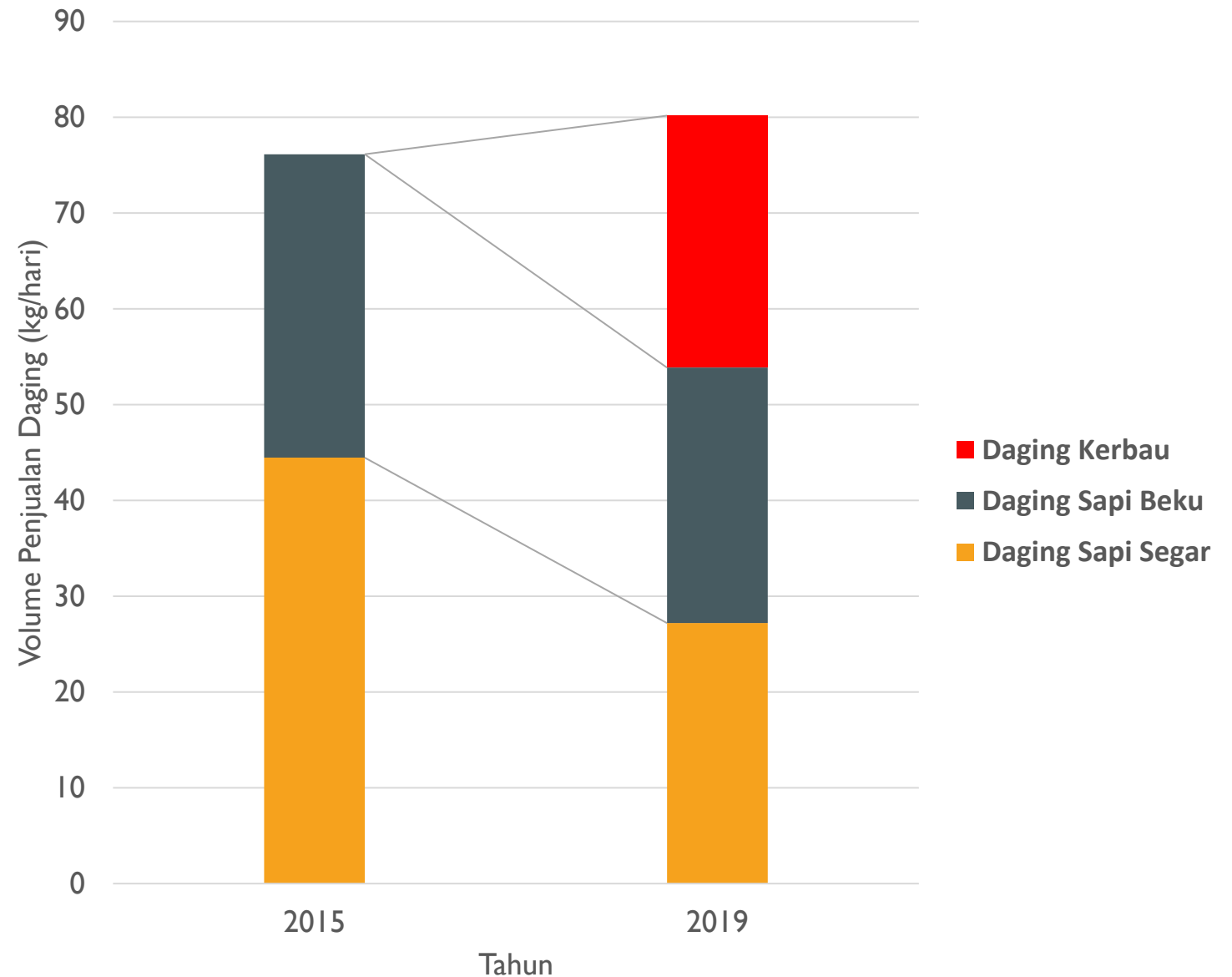
Pasal 36 B:

Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan **memperhatikan kepentingan peternak.**

PANGSA PASAR DAGING

INTERVENSI IMPOR
DAGING INDIA
PASAR SAPI LOKAL
BERALIH KE IDUL
KURBAN

Sumber : Daud, 2020



Data Primer, 2019

KEGAGALAN SWASEMBADA DAGING SAPI/KERBAU

Program unggulan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tahun	Program	Alasan ketidak berhasilan
1	1995 – 2000	Swasembada on trend	1. Hanya jargon; 2. tidak didukung oleh kebijakan Nasional lintas Departemen, kebijakan operasional dan dana;
2	2000 – 2005	Kecukupan Daging Sapi	1. Program tidak secara sistematis disusun. 2. Tidak ada penetapan target pertahun 3. Tidak ada dukungan dana & SDM untuk mencapainya. 4. Lebih berupa jargon-jargon dan belum didukung oleh instansi lain
3	2005 – 2010	Percepatan Swasembada Daging Sapi	1. Program telah memiliki target tahunan dan di susun sistematis. 2. belum ada dukungan anggaran yang memadai atau tidak pintar mencari dana
4	2010 – 2014	Swasembada Daging Sapi Dan Kerbau	1. Program sudah jelas, terukur dalam Blue Print PSDS 2. Didalamnya ada keterkaitan peternak, swasta dan pemerintah 3. Blue Print terbuka untuk dikritisi yang membangun 4. Dukungan anggaran sudah ada tetapi belum memadai 5. Belum menjadi suatu gerakan baru berupa program
5	2014 - 2019	Swasembada daging sapi	1. Roadmap tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan program 2. Kebijakan kontra produktif 3. Pembiayaan yang tidak cukup
6	2020 - 2024	SIKOMANDAN	1. PM

Sumber : Tawaf (2014) data diolah

TUPOKSI DITJEN PKH (KEMENTAN)

Permentan No. 43/2015 tentang organisasi dan tatakerja Kementan sesuai dengan Perpres No. 45/2015 tentang Kementrian Pertanian.

- terdiri dari 332 halaman,
- kata pertanian terdapat 714 kata
- 130 kata peternakan,
- kata petani hanya 27 kata
- tidak ada kata peternak,
- tidak ada kata kemakmuran,
- kata kesejahteraan ada 26 kata, dimana 24 katanya ditujukan untuk kesejahteraan hewan dan
- tidak ada kesejahteraan yang ditujukan untuk petani/peternak.

kebijakan ini hanya mengatur mengenai “kelembagaan pertanian atau peternakan”

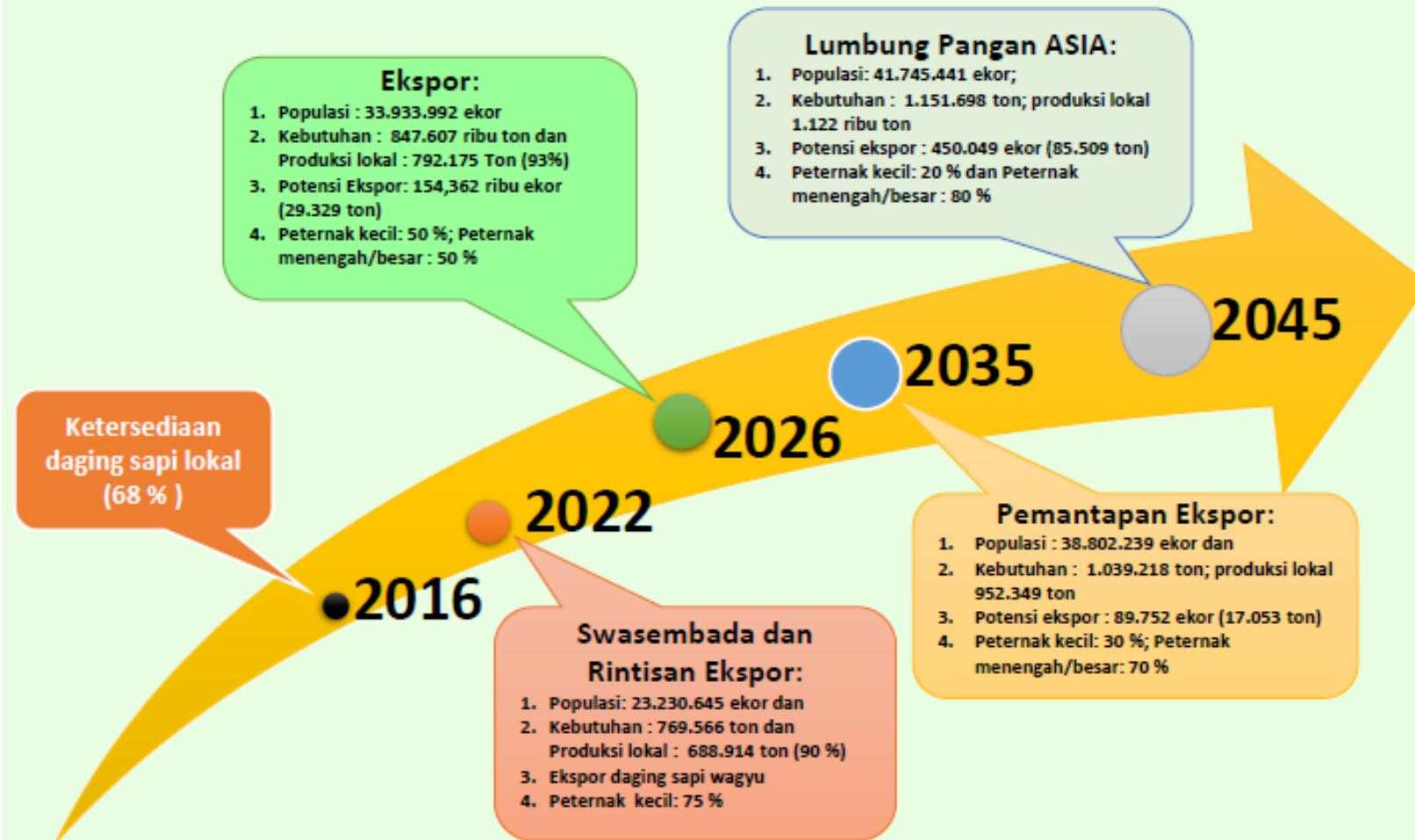
tupokasi Kementan membuat SOP untuk dirinya sendiri dan infra struktur pendukungnya

tidak mengelola petani/peternak dan budayanya secara langsung.

KENDALA KEBIJAKAN

1. **Kebijakan Larangan penggunaan hormon pertumbuhan** (UU No. 41/2014 pasal 22 ayat 4.c)
2. **Kebijakan lamanya pemeliharaan penggemukan sapi impor** paling cepat 4 bulan (UU 41/2014, pasal 36B, ayat 5)
3. **Kebijakan perubahan berat badan impor sapi bakalan dari 350 kg menjadi 450 kg** (Permentan 49/ 2016 jo. 02/2017 pasal 15).
4. **Kebijakan membebaskan Impor Daging dan Sapi** (Permentan No 17/2016, Permentan No. 34/2016 dan Permendag No. 59/2016),
5. **Kebijakan membuka impor dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku** (PP 4/2016 dan SK Mentan No.2556/2016); kebijakan ini sesungguhnya bertentangan dengan UU No. 41 tentang PKH pasal 36 E ayat 1, bahwa importasi ternak/produk hewan bisa dilakukan dari Negara/zona suatu Negara yang bebas penyakit menular. Sementara itu, PP 4/2016 dan SK Mentan 2556/2016 tegas melanggar UU No. 41/2014.
6. **Dalam peta jalan Pengembangan Sapi dan Kerbau** yang disusun oleh Ditjen PKH (2015), bahwa Indonesia di tahun 2045 akan menjadi lumbung pangan dunia
7. **Kebijakan rasio impor sapi bakalan dengan indukan** (Permentan 02/2017 pasal 7).
8. Kebijakan yang terakhir tahun ini, adalah **terbitnya permentan No. 136/2020** tentang karantina dan surat edaran bulog harga daging Rp. 59 Ribu/kg.

GRAND DESAIN PENGEMBANGAN SAPI 2045



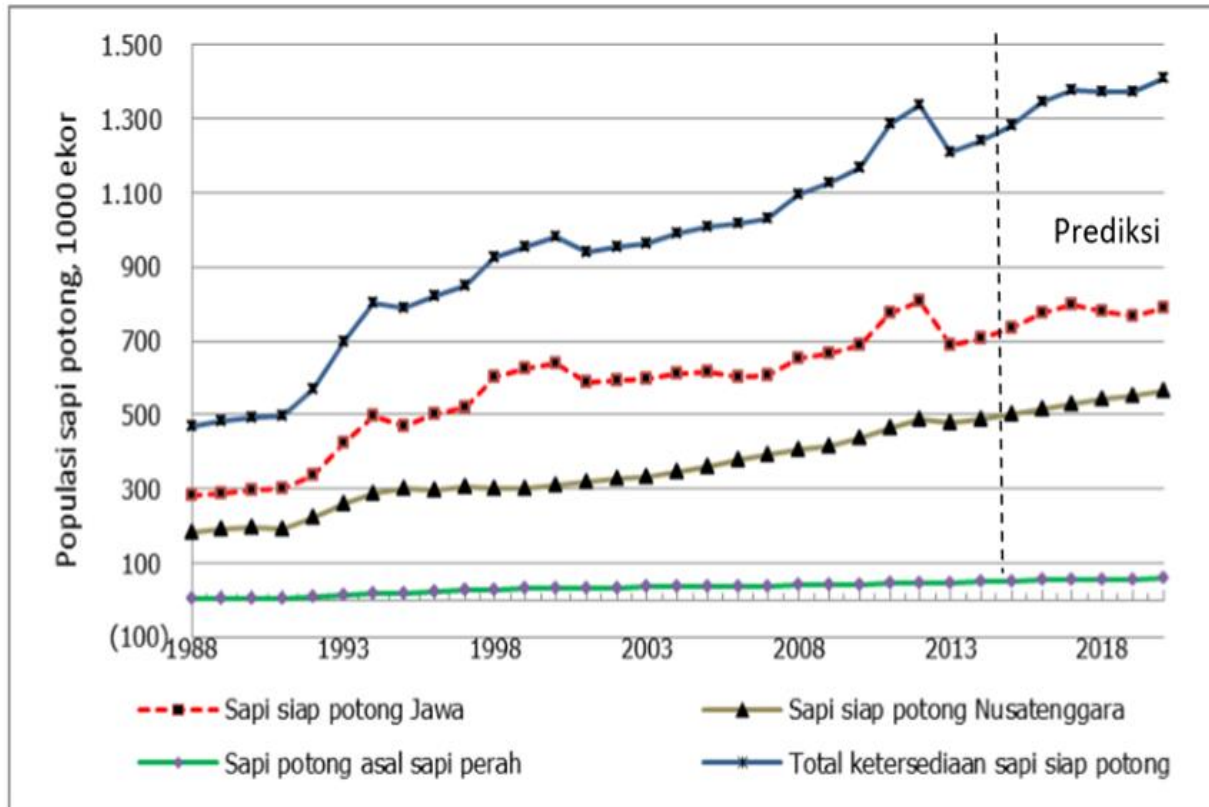
Catt: Diperlukan importasi indukan sebanyak 3,2 juta ekor selama 10 tahun pertama



Kritik terhadap Grand Desain Pengembangan Sapi 2045 sebagai lumbung pangan Asia :

1. Tidak dijalankan dengan baik program yang sudah ditetapkan.
2. Tidak didukung dana yang cukup
3. Tidak belajar dari pengalaman periode yang lalu.
4. Tupoksi Ditjen PKH tidak focus kepada peternak (outcome nya)

Analisis Perspektif – Proyeksi Populasi



Gambar 4.5. Prediksi ketersediaan sapi siap potong jantan dewasa dan sapi perah di dua wilayah, Jawa (Jateng, DIY, Jatim) dan Nusa Tenggara (Bali, NTB dan NTT) dari tahun 1988-2020 dengan menggunakan metode SYSDYN.

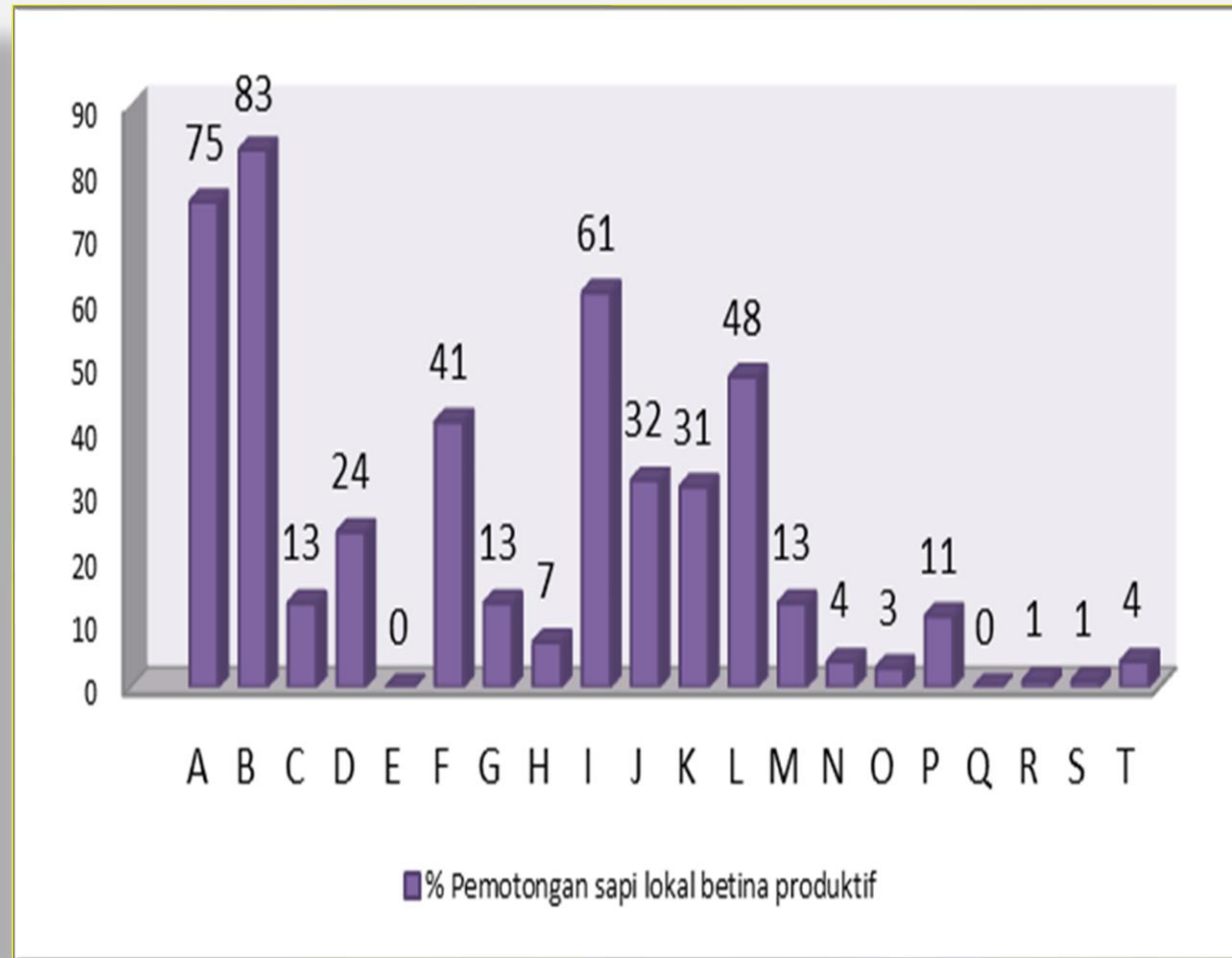
Sifat datanya dinamis (supply maupun demand) tidak liner, maka gunakan “analisis dynamic”

Tabel 4.3. Ketersediaan sapi siap potong asal sapi potong Jawa sapi potong Nusa Tenggara dan sapi perah jantan 2015-2020 dengan metode SYSDYN

Tahun	Sapi potong Jawa, ekor	Sapi potong Nusa Tenggara, ekor	Sapi potong perah jantan Jawa, ekor	Total, ekor
2015	733.281	501.574	49.985	1.284.839
2016	776.450	517.163	52.037	1.345.650
2017	796.387	530.937	52.460	1.379.784
2018	779.912	540.646	52.869	1.373.427
2019	768.162	550.620	54.831	1.373.612
2020	789.201	563.845	56.836	1.409.882

SAPI BETINA UMUR PRODUKTIF YANG DIPOTONG

sumber : Tawaf, R (2013)



Jumlah sapi betina umur produktif yang dipotong di 20 RPH selama periode studi adalah sebanyak 2.489 ekor atau **31,08 %** dari jumlah sapi lokal yang dipotong (8.008 ekor).

Umur < 4 thn 65 %

Umur > 4 thn 35 %

KONDISI RPH DI WILAYAH KAJIAN

(Tawaf, 2013)



Proses Pemotongan



**Ketersediaan daging sapi,
harus difokuskan pada
program perbibitan dan
pembiakan**

EKSISTING KONDISI PETERNAKAN SAPI POTONG

- **Peternakan Rakyat (farming sistem), ternak sebagai “rojo koyo”, dan “status sosial” 98%**
- **Perusahaan peternakan (industri peternakan), yang memiliki SOP dan berorientasi pada keuntungan usaha..2%**





PERBIBITAN TUGAS PEMERINTAH

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya **wajib untuk melakukan pengembangan** usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan atau bakalan.

UU No. 11/2020 Ciptakerja, Pasal 13, ayat 2

PESAN MENTAN (suswono)
RAKONTEKNAS II, DI BALI 28 NOV 2011

yang cukup mengkhawatirkan bagi kelangsungan swasembada daging sapi yaitu semakin tingginya dominasi sapi persilangan dalam usaha budidaya masyarakat. Sedangkan menurut para ahli, ternak silangan tersebut semakin lama fungsi reproduksinya makin menurun.

Dalam situasi ini yang harus bertanggungjawab adalah justru Pemerintah, yang menjadikan program-program perbibitan selama ini ternyata tidak terarah.

KRITIKAL POINT BISNIS PEMBIAKAN (bibit sebar)

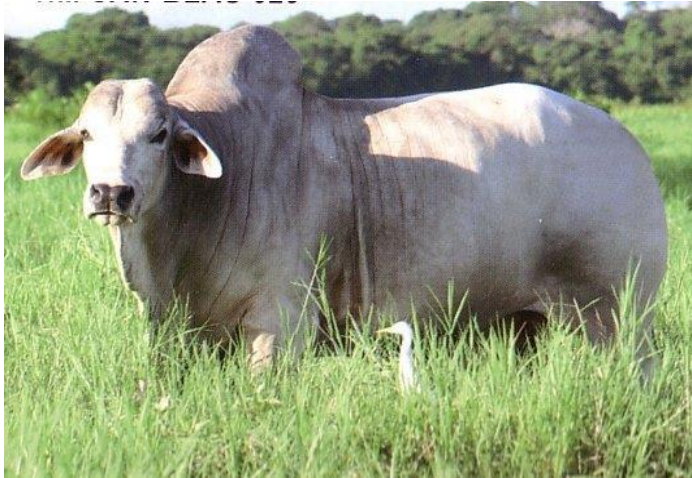
- Peternakan rakyat (skala kecil = farming system)
- Bunga bank (khusus)
- Pola breeding yang tidak terarah
- Kebijakan VBC belum realistik
- Pemotongan betina produktif
- Pay back periodenya diatas 5 tahun, grace periode setelah tahun ke 3
- Kepastian usaha (pengaman bibit/asosiasi)

Kelembagaan pembibitan dan pembiakan

- 1. Balai Embryo Transfer (BET)**
- 2. Balai Inseminasi Buatan (BIB)**
- 3. Balai Perbibitan Ternak Unggul (BPTU)**
- 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**
- 5. Village Breeding Centre (VBC)**
- 6. Kelompok Peternak/Assosiasi**



PERBIBITAN PEMERINTAH



**BET - BIB
(BIBIT DASAR)**



BPTU

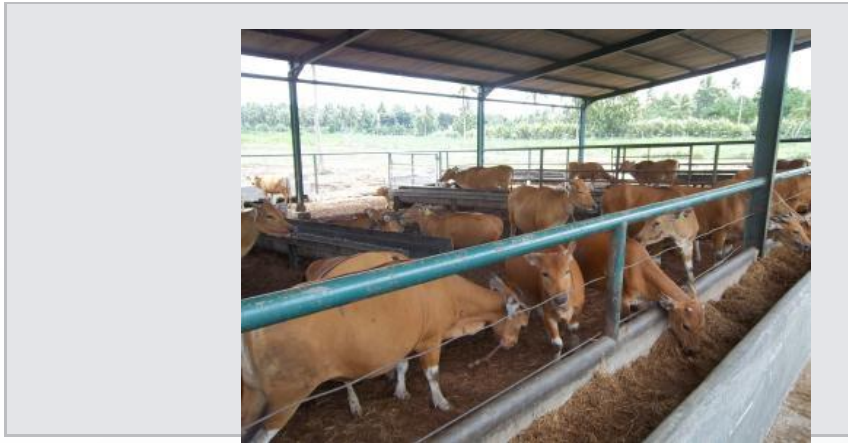


UPTD

**BET DAN BPTU MILIK PEMERINTAH PUSAT MENGUASAI BIBIT DASAR
DALAM BENTUK JANTAN + (EMBRYO DAN SEMEN)**

KELEMBAGAAN PETERNAK

KAWASAN PENGEMBANGAN
Kluster sapi potong



VBC – 2 juta ekor indukan

KELOMPOK PETERNAK



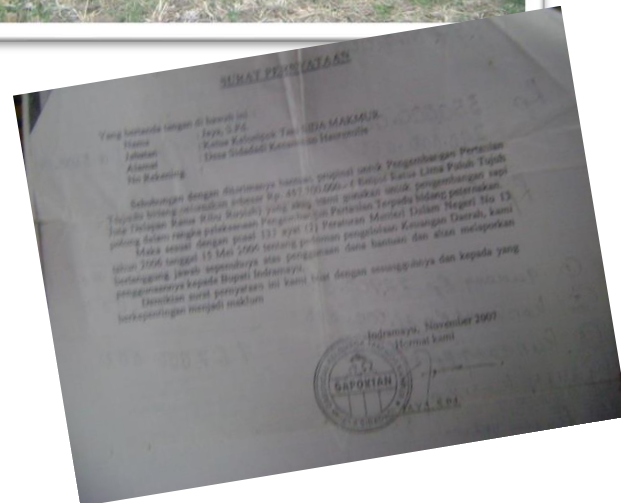
KELOMPOK SMD



P E T E R N A K R A K Y A T

UPTD-BPTU-BIB
(pemerintah)

KELOMPOK SIDAMAKMUR HAURGEULIS INDRAMAYU



KELOMPOK INI RELATIF TIDAK BERKEMBANG

KELOMPOK PENASARAN KEC BBK CIKAO PURWAKARTA



LAPORAN PERKEMBANGAN TERNAK SAPI
KELOMPOK PENASARAN
DESA MARACANG

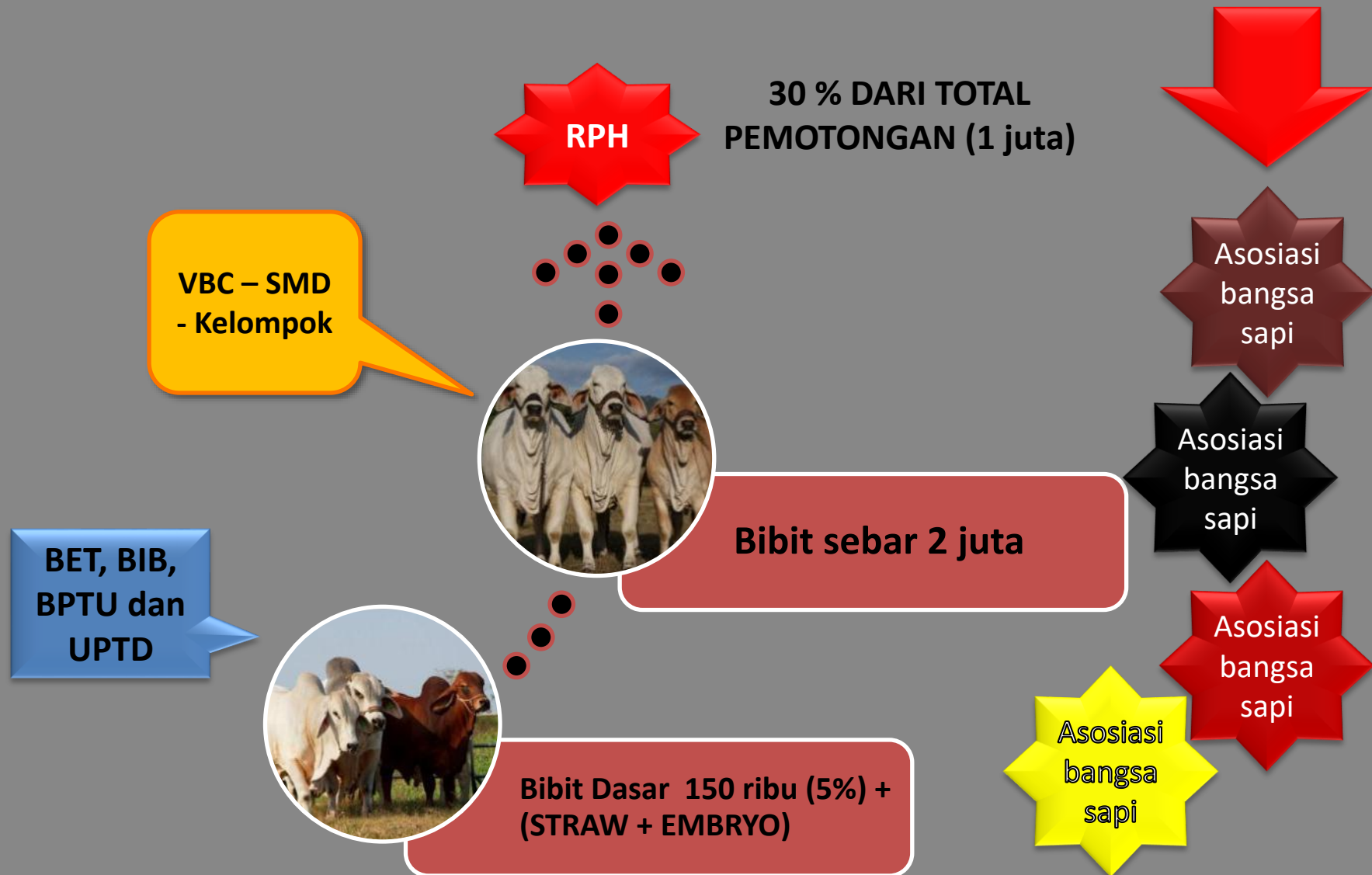
NO.	NAMA	ALAMAT	BIRIT YANG DITERIMA	KEADAAN SEKARANG	KETERANGAN
1.	PARIN	Kp. Krajan	Betina 1	LAHIR BETINA	
2.	BOIAK	Kp. Krajan	Betina 1	LAHIR BETINA	
3.	USEP SAEPUDIN	Kp. Paurungka	Betina 1	LAHIR BETINA	
4.	ABDUL MAJID	Kp. Krajan	Betina 1	LAHIR BETINA	
5.	SOMANTRI	Kp. Krajan	Betina 1	LAHIR JANTAN	
6.	JAI	Kp. Krajan	Betina 1	LAHIR BETINA	
7.	DOYOT	Kp. Krajan	Betina 1	LAHIR BETINA	
8.	DAYAT	Kp. Rawabolang	Betina 1	LAHIR BETINA	
9.	LAMBRA	Kp. Krajan	Betina 1	LAHIR BETINA	
10.	KASDI	Kp. Rawabolang	Betina 1	LAHIR JANTAN	
11.	RASDI	Kp. Krajan	Betina 1	LAHIR JANTAN	
12.	SARDIA	Kp. Krajan	Betina 1	LAHIR BETINA	
13.	ADI	Kp. Ali Handan	Betina 1	LAHIR BETINA	
14.	ANA	Kp. Ali Handan	Betina 1	LAHIR BETINA	
15.	YANA	Kp. Ali Handan	Betina 1	LAHIR JANTAN	
16.	JAIUN	Kp. Paur Nangka	Betina 1	LAHIR BETINA	
17.	KARIM	Kp. Paur Nangka	Betina 1	LAHIR BETINA	
18.	UWAS	Kp. Rawabolang	Betina 1	LAHIR BETINA	
19.	DARMA	Kp. Paur Nangka	Betina 1	LAHIR JANTAN	
20.	OSMAN	Kp. Karang Anyar	Betina 1	LAHIR BETINA	
21.	ASMITA	Kp. Karang Anyar	Betina 1	LAHIR JANTAN	
22.	UKAR	Kp. Karang Anyar	Betina 1	LAHIR BETINA	
23.	ODING	Kp. Rawabolang	Betina 1	LAHIR JANTAN	
				LAHIR JANTAN	
				LAHIR JANTAN	
				LAHIR BETINA	
				LAHIR BETINA	
				LAHIR BETINA	
				LAHIR JANTAN	

Maracang, Juli 2009
Ketua Kelompok Panasaran

PARIN



TARGET AKTIVITAS KELEMBAGAAN PERBIBITAN



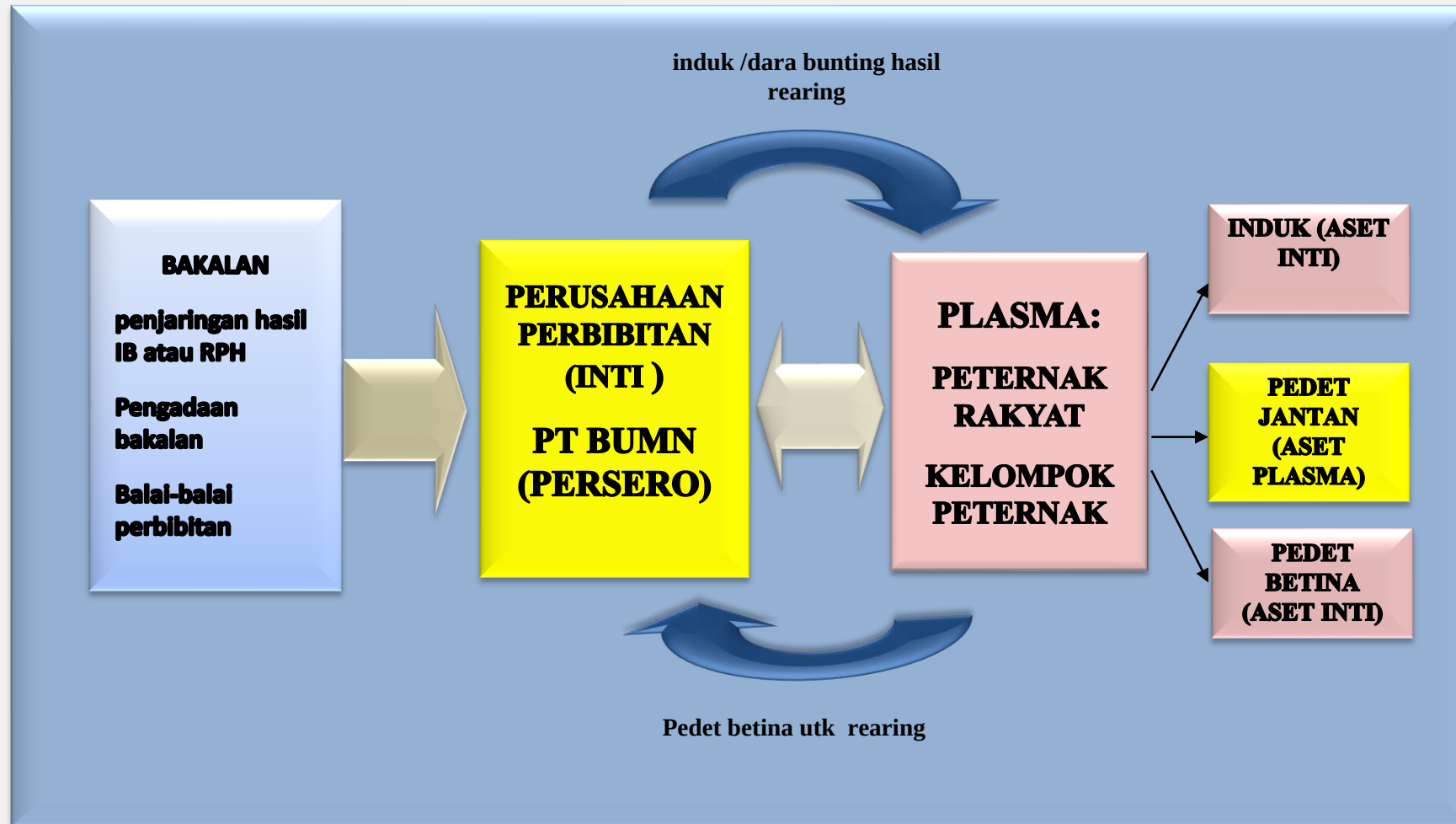
KEMITRAAN INTI PLASMA PADA USAHA TERNAK RAKYAT DENGAN INDUSTRI



DESAIN ASPIRATIF

MODEL KEMITRAAN INDUSTRI PERBIBITAN SAPI POTONG

(sumber : Tawaf, dlm Dispet Jabar, 2011)



Kesimpulan

- Ketersediaan daging sapi, dapat dilakukan dari produksi daging domestik dan impor (sapi dan daging)
- Import daging kerbau asal india berdampak negative terhadap program ketersediaan daging domestik.
- Ketersediaan daging sapi domestik harus difokuskan terhadap program breeding yang terarah.
- Pola kluster kawasan pengembangan VBC dan kemitraan peternak dengan industry menjadi pendukung dalam ketersediaan daging domestik

Terima Kasih